



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-14.KP.03.04 TAHUN 2020

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM MADYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-KP.10.02-01 tanggal 06 Januari 2020, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LN Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM MADYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Maret 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
4. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
6. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
10. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-14.KP.03.04 TAHUN 2020

TANGGAL : 09 Maret 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	MUHAMAD ZEN S.H., M.H. NIP. 196705051991031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi	Penyuluh Hukum Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi	670
2.	ARIF SUMARSONO S.Pd., M.H. NIP. 196404091990011001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi	Penyuluh Hukum Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi	632
3.	WELLY TAHULENDING S.H., M.H. NIP. 196203151992031001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	Penyuluh Hukum Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	527
4.	GASPER MELKISEDEK KESE S.H., M.H. NIP. 196403261991031001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur	Penyuluh Hukum Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur	527
5.	TRI PUJI RAHAYU. S.H., M.H. NIP. 197002281991032002	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pencegahan pada Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan	Penyuluh Hukum Madya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	527
6.	HERIYANTO Bc.I.P., S.H., M.H. NIP. 197010151993031001	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta	Penyuluh Hukum Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	527
7.	NANIK MUHAYATI S.H., M.Hum. NIP. 196301051990032001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum dan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur	Penyuluh Hukum Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur	527

1	2	3	4	5	6
8.	NURDIANA S.Pd. NIP. 197207291998022001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan	Penyuluh Hukum Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan	522
9.	ELIZABETH ADRIANA S.S., M.Si. NIP. 197210032000032001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	Penyuluh Hukum Madya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	490
10.	Drs. MUHAMMAD ZUHRI S.H., M.H. NIP. 196909102002121001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbagian Penyusunan Program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	Penyuluh Hukum Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	490
11.	TOTO KUNCORO S.H., M.H. NIP. 197307291993031001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	Penyuluh Hukum Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	490
12.	ESTER SINAGA S.Sos., M.H. NIP. 196410231991032001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	Penyuluh Hukum Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	453
13.	SAFRUDIN S.H., M.H. NIP. 196401151985031002	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah	Penyuluh Hukum Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah	416
14.	IDA AYU PUTU HERAWATI S.H. NIP. 196707191990032001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbagian Program dan Pelaporan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	Penyuluh Hukum Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Bali	400
15.	FERRY YULIANTO S.H., M.H. NIP. 197307161993031003	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Pangkal Pinang	Penyuluh Hukum Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung	400

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY